

## Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula

Fitri Aprillia Fokatea<sup>1</sup>, Wawan Mas'udi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

(Corresponding author: fitri.afokatea@gmail.com)

Received: 11 November 2020; Accepted: 01 December 2020; Published: 08 December 2020

### Abstrak

Studi ini menekankan pada bagaimana konsolidasi elit dilakukan untuk membentuk dan mempertahankan kekuasaan bagi sebuah politik keluarga di Kabupaten Kepulauan Sula. Bermula dari salah satu anggota keluarga yang maju dan berhasil dalam Pilkada sebagai Bupati, lalu menciptakan elit lokal Kepulauan Sula yang baru dan membentuk suatu politik keluarga yang dikenal dengan Keluarga Mus. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa jalur yang digunakan keluarga Mus untuk melanggengkan kuasa politiknya. Dua jalur utama sebagai sumber kekuasaan yakni melalui kooptasi kekuasaan di internal partai politik dan juga jalur birokrasi. Selain itu, dugaan adanya jalur sumber kekuasaan lain yaitu melalui pemekaran Pulau Taliabu yang juga akan dijelaskan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa elit lokal di Kepulauan Sula melalui konsolidasi kekuatan dan kekuasaannya telah menciptakan satu fenomena politik yakni hadirnya politik keluarga di Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan di bidang politik dan pemerintahan, dan secara praktis memberikan pelajaran penting bagaimana elit lokal meraih kekuasaan politiknya.

**Kata kunci:** Elit Lokal; Politik Keluarga; Konsolidasi Elit.

### Abstract

*This study emphasizes on how elite consolidation is carried out to form and maintain power for family politics in the Sula Islands Regency. Starting from one of the family members who advanced and succeeded in the Pilkada as a Regent, then created a new local elite in the Sula Islands so that the sources of power could be managed to form a family politics known as the Mus Family. This research is descriptive using a qualitative approach, data obtained through field observations, in-depth interviews, and documentation. The results of the study found that there were several routes used by the Mus family to perpetuate their political power. Two main lines as a source of power, namely through the co-optation of power within political parties and also through the bureaucracy. Also, the alleged existence of another source of power through the expansion of Taliabu Island will be explained. Based on these findings, it can be concluded that the local elites in the Sula Islands through their consolidation of strength and power have created a political phenomenon, namely the presence of family politics in the Regency of Sula Islands. This research is expected to contribute to science in politics and government, and practically provide important lessons on how local elites gain political power.*

**Keywords:** Local Elite; Family Politics; Elite Consolidation.

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 adalah tahun politik yang kesekian kalinya dilalui oleh para elit dalam berkontestasi memperebutkan posisi nomor wahid di ranah lokal. Momen tersebut adalah penentuan dimana babak awal dan akhir dari petualangan para elit dan aktor politik, babak awal bagi yang terpilih dan babak akhir bagi yang tidak terpilih. Namun dari yang terpilih, diantaranya tak sedikit yang hanya melanjutkan “estafet kekuasaan” dari generasi sebelumnya, atau melanjutkan kekuasaan yang dipegangnya sendiri. Harapan terbaik, seharusnya tahun tiap politik dijadikan momentum terjadinya regenerasi para aktor politik sesuai dengan mekanisme yang prosedural. Namun realita politik yang terjadi ialah justru menciptakan sebuah siklus atas langgengnya kekuasaan dari generasi ke generasi (Haryanto, 2014).

Fenomena munculnya sentimen dalam politik lokal di Indonesia dipahami sebagai hasil kombinasi tekanan politik sentripugal (sentralisasi) pada masa Soeharto dan tekanan politik sentripetal (desentralisasi) pasca-Soeharto (Nordholt, 2005). Meskipun di awal-awal pelembagaan desentralisasi pola ini belum terlihat, akan tetapi memasuki dekade kedua pasca reformasi, kecenderungan

pada semakin oligarkisnya kekuasaan politik lokal semakin terlihat nyata. Secara teoritis, para keluarga/kerabat/kelompok politik menggunakan berbagai modal seperti yang kita kenal kategorisasi modal dari Bourdieu yaitu modal ekonomi, modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik, sebagai basis legitimasi kekuasaan. Mayoritas studi di Indonesia lebih fokus pada dua hal yakni; (i) fenomena politis yang terjadi setelah para aktor politik berhasil mendapatkan kekuasaan dengan cara sedemikian rupa sehingga terciptalah oligarki, dan; (ii) proses-proses tata kelola politik pemerintahan yang mereka lakukan (kepiawian mengelola modal politik) sebagai pejabat, pengusaha, ataupun bangsawan (Haryanto, 2014).

Terdapat bias antara penggunaan istilah politik keluarga dan politik dinasti (sering digunakan dalam sistem monarki). Walaupun nanti akan tetap muncul istilah dinasti politik dikarenakan istilah ini sering digunakan para peneliti lainnya dalam menyebut fenomena politik keluarga, dengan maksud pengertian yang serupa. Munculnya fenomena politik keluarga sendiri ditandai oleh keikutsertaan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik, baik itu pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), atau penempatan jabatan-

jabatan penting lainnya (Purwaningsih, 2015; Dal Bo et al, 2009; Asako et al, 2015; Querubin, 2012). Semakin menguatnya politik keluarga, mengindikasikan gejala apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai neopatrimonialistik, yaitu raja-raja kecil di daerah yang semakin memperluas kekuasaan politiknya melalui jaringan kekerabatan (Sujarwoto 2016). Kemunculan elite lokal ini menurut Sidel (2005) diakibatkan oleh sistem pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun bergeser ke sistem pemilihan yang langsung dipilih oleh rakyat. Dalam konteks Indonesia, munculnya keluarga politik ini diindikasikan oleh para ahli sebagai akibat dari reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah yang menciptakan elite lokal atau local bossism (Bakti, 2014; Bakar, 2016; dan Suaib, 2016).

Lebih lanjut, menurut Clubok, Wilensky, dan Berghorn dalam Pasan (2013) bahwa dinasti dalam konteks politik kontemporer muncul dengan berbagai bentuk, termasuk bentuk lebih halus dengan cara mendorong sanak keluarga elit lama untuk terus memegang kekuasaan yang diturunkan secara demokratis oleh para pendahulu. Terdapat pula bentuk dinasti di era modern yaitu dengan mempersiapkan

anggota keluarga yang bersangkutan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen politik secara dini, sehingga muncul berikutnya seakan-akan karena wajar dan rasional. Sedangkan Querubin (2012) memahami bahwa anggota keluarga yang masih menjabat di pemerintahan aktif akan mempersiapkan anggota keluarga yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin, namun belum dikenal publik, yang mana ini merupakan satu strategi. Pada saat ini terjadi, maka sistem politik sebenarnya telah menciptakan keberlangsungan dinasti itu sendiri (Wardhani, 2015).

Pemaknaan politik keluarga secara perspektif memang beririsan dengan istilah dinasti politik. Dimana makna serupa ditemukan dalam pengertian para ilmuwan lainnya tentang dinasti politik. Kehadiran dinasti politik sendiri menurut Rossi (2009) telah hadir di seluruh dunia, bahkan di negara-negara demokratis, namun hal ini tidak mencerminkan ketidaksempurnaan sistem demokrasi negara tersebut. Terdapat korelasi positif antara panjangnya masa jabatan seseorang di lembaga pemerintahan dengan pendirian atau pembentukan sebuah dinasti politik di pusaran kekuasaan tersebut. Bertahannya elit karena memiliki kerabat di pemerintahan pada periode berikutnya disebabkan karena pengenalan nama keluarga dapat membentuk dinasti

politik dalam suatu lembaga pemerintah. Masyarakat cenderung memilih calon anggota yang nama keluarga dikenal sebelumnya.

Penggunaan politik keluarga sebagai pintu utama dalam rekrutmen politik cukup menjelaskan bahwa politik keluarga ada dimana saja, kapan saja dan digunakan siapa saja selama ada kekuatan besar untuk mempengaruhi sumber daya. Tidak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula. Gambaran perjalanan politik keluarga/klan/dinasti politik yang tergambar diatas, menggambarkan secara gamblang bahwa bagaimana keluarga dijadikan sumber rekrutmen politik utama adalah sesuatu yang sah dan justru dijadikan sebagai strategi paling berhasil. Dalam hal ini, ketika seorang anggota keluarga memiliki power dan berhasil menguasai sumber daya yang ada, maka sangat mungkin dan mudah bagi anggota keluarga yang lain untuk menjejaknya. Karena berhasilnya satu anggota keluarga dalam memegang pengaruh politik, diibaratkan seperti membuka pintu yang akan dengan mudah membiarkan anggota keluarga yang lain untuk masuk dan menjadi bagian dari elit penguasa itu sendiri.

Dalam perspektif teori elit, majunya kerabat petahana menyebabkan sirkulasi

elit hanya terjadi di kalangan keluarga penguasa dan menutup peluang bagi calon-calon alternatif di luar elit penguasa. Politik kekerabatan ini cukup problematik karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warganegara. Bahkan politik kekerabatan dianggap membajak demokrasi (Purwaningsih, 2015). Elit melibatkan dirinya dalam beberapa cara atau jalan agar dapat mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya. Bisa melalui pemilu/pemilukada dengan jalur partai yang mendukung keberadaan politik keluarga, birokrasi (post-elektoral), dan hingga kendali kekuatan yang menggunakan pintu pemekaran daerah baru. Elit yang kemudian muncul di Kabupaten Kepulauan Sula, ialah dengan wajah politik keluarga.

Kekuatan politik yang dibangun oleh keluarga Mus ini bisa dikatakan sebagai sebuah oligarki baru yang hadir di tengah-tengah Kabupaten Kepulauan Sula yang berumur masih muda saat itu. Politik keluarga ini dibangun oleh sang kakak yaitu Ahmad Hidayat Mus saat terpilih sebagai Bupati pertama di Kabupaten Kepulauan Sula setelah mekar pada tahun 2003. Politik kekerabatan ini mulai terciptan sejak sepak terjang kedua adik lelaki Ahmad Hidayat Mus yaitu Zainal Mus dan Aliong Mus.

Aliong yang kemudian mulus dan langsung melejit menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari fraksi Golkar di periode 2004-2009, setahun setelah kakaknya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Disusul saudara lainnya, yaitu Zainal Mus yang menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014. Zainal Mus dan Aliong Mus sempat bertarung untuk menjadi Bupati di Kabupaten pemekaran baru yaitu Kabupaten Taliabu. Walau akhirnya Zainal Mus harus menerima kekalahan dari saudaranya sendiri Aliong Mus yang terpilih sebagai Bupati pertama Kabupaten Taliabu.

Beberapa peneliti telah mendiskusikan lebih lanjut mengenai fenomena orang kuat lokal ini, seperti yang dilakukan oleh Smith (2012) dan Querobin (2012). Namun, mereka lebih menyoroiti terbentuknya politik keluarga atau bahasa yang lebih digunakan para ilmuwan ialah dinasti politik karena penerapan sistem pemilihan umum. Sementara, karya lain dari peneliti Indonesia seperti Purwaningsih (2015) lebih memfokuskan penelitiannya pada aspek kualitas kandidat politik keluarga. Penelitian yang dilakukan Haryanto (2014) juga memberikan perhatian kepada aspek-aspek yang terdapat di dalam modalitas. Namun,

tulisan ini hanya menawarkan aspek alur dan strategi konsolidasi kekuatan dari politik keluarga yang terjadi di Kepulauan Sula.

Hadirnya fenomena politik keluarga Mus sebagai elit lokal di Kepulauan Sula ini terbilang cukup menarik. Dimana mereka bukanlah dari golongan bangsawan, pejabat ataupun mempunyai darah dari tokoh adat yang mengalir kental. Satu-satunya modal yang dimiliki ialah modal ekonomi dengan basis sebagai pengusaha kayu. Maka dari sinilah pertanyaan-pertanyaan yang mengawali penelitian ini seperti bagaimana keluarga Mus mengkonsolidasikan kekuatan keluarganya dalam menciptakan dan mempertahankan kekuasaan di Kepulauan Sula? Bagaimana kendali kekuatan yang digunakan sehingga dapat memegang power sebagai elit lokal di Kepulauan Sula? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat menjadi titik awal untuk menjelaskan kekuatan politik keluarga dalam politik lokal di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan tipe penelitian berupa riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Nawawi (2007), metode deskriptif diartikan sebagai prosedur

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau obyek yang diteliti, seperti individu, lembaga, masarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengambil pendekatan secara studi kasus yang mana pendekatan ini dilakukan agar dapat secara intensif dan rinci untuk memahami satu gejala tertentu, seperti bagaimana strategi elit lokal mempertahankan kekuasaannya.

Data didapatkan secara langsung dari sumber terpercaya dan berkompeten dalam menjawab masalah penelitian, dan pemilihan narasumber ditentukan secara *purposive*. Wawancara mendalam dengan narasumber menjadi senjata utama dalam mengungkapkan fenomena yang terjadi, narasumber yang dihadirkan cukup mewakili suara dari masyarakat karena datang dari beragam latar belakang, seperti; Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Maluku Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Kebijakan, Komisi I DPRD Kabupaten induk yaitu Kabupaten Kepulauan Sula yang mengurus tentang pemekaran, Tokoh akademisi dari STAI Kabupaten Kepulauan Sula, Tokoh dan warga masyarakat. Data dianalisis secara bertahap, mulai dari penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fenomena kekuatan keluarga yang dimanfaatkan sebagai sumber rekrutmen politik utama bukanlah hal baru di Indonesia. Harahap (2016) dalam bukunya *Klanisasi Demokrasi* menjelaskan dengan gamblang tentang politik klan yang dibawa oleh Klan Qahar Mudzakkar di Sulawesi Selatan. Buku ini mendefinisikan Politik Klan sebagai praktik politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Gambaran lain politik keluarga yang cukup sensasional dalam ranah politik lokal di Indonesia adalah dinasti politik Atut di Banten. Bagaimana Ratu Atut memanfaatkan dengan baik pengaruh besar ayahnya, TB Chasan Sohib, yang memiliki ikatan emosional dengan rakyat Banten. Besarnya pengaruh ayah dari Ratu Atut ini dikarenakan hubungan baiknya dengan pemerintahan dimana TB Chasan Sohib mempunyai massa yang sangat banyak, sehingga ia disebut tokoh yang berada diluar lembaga formal pemerintahan tapi mampu menciptakan sebuah pemerintahan bayangan (*shadow state*). Bukan hanya Ratu Atut, perlahan generasi dari TB Chasan Sohib juga mulai terjun ke dunia politik dengan mulus. sampai disini sudah terlihat jelas bahwa keluarga sebagai pintu masuk rekrutmen politik adalah “jalan

pintas” yang dibutuhkan para politisi guna mendapatkan jabatan politik (Harahap, 2016).

Secara global, dinasti keluarga yang cukup mendunia di Amerika memunculkan klan Kennedy. Klan Kennedy sendiri merupakan salah satu dinasti politik pertama era modern di Amerika yang berhasil bertahan hingga saat ini. Hal ini tercermin ketika Jhon F. Kennedy (JFK) yang kemudian menjadi satu-satunya klan Kennedy yang berhasil menduduki jabatan presiden. Keberhasilan JFK ini tak luput dari peran besar sang ayah, Joseph Patrick Kennedy sebagai duta besar Amerika untuk Inggris pada masa pemerintahan Roosevelt serta nama besar sang kakek John ‘Honey’ Fitzgerald yang pernah menjabat sebagai walikota Boston. Keberhasilan karir politik JFK didukung penuh oleh keluarga Kennedy, baik secara finansial maupun secara manajerial. Bahkan, kedudukan klan Kennedy saat ini dilanjutkan oleh generasi ketiga yakni anak dari JFK, Caroline Bouvier Kennedy yang menjadi duta besar Amerika untuk Jepang tahun 2013 dan Joseph P Kennedy III yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat AS (Wardhani, 2015). Politik keluarga yang dijalankan oleh generasi Kennedy di negara maju sendiri, dalam budaya politik termasuk dalam familisme yang berstatus dalam bentuk

prestasi (*achieved status*). Hal ini terjadi karena pada umumnya para elit terjun ke dunia politik setelah melewati fase pengkaderan politik, baik dalam internal keluarga maupun eksternal melalui jalur aktivisme maupun partai politik, sehingga ketika menjabat sudah mengerti apa yang harus dikerjakan (Djati, 2014).

Kepulauan Sula mulai mengenal politik secara langsung dan formal ialah pada tahun 2004, dimana diadakan Pilpres secara langsung untuk pertama kalinya, bertepatan dengan setahun Kepulauan Sula dimekarkan. Hal ini menciptakan daftar partai politik yang siap mendirikan cabang-cabang mereka di tanah Sula. Terlihat jelas pada Pileg-Pilpres (2004) dan Pilkada (2005), Golkar menjadi partai yang mendominasi. Kedigdayaan Golkar semakin kuat pasca terpilihnya Ahmad Hidayat Mus (AHM) dalam Pileg yang mengantarkannya menjadi ketua DPRD Sula. Pilihan AHM pada Golkar tentu menjadi pilihan yang tepat saat itu, dimana selain kekuasaan Golkar dari pusat hingga akar rumput yang memang saat itu kuat di Sula, AHM juga melakukan pendekatan-pendekatan jalur pribadi kepada para tetua-tetua Kepulauan Sula di Ternate yang notabeneanya adalah para kader partai Golkar.

Setahun berselang setelah pencapaiannya sebagai Ketua DPRD, modal elektabilitas besar tersebut menjadikan AHM maju mencalonkan diri sebagai Bupati Sula hingga kemudian terpilih selama dua periode berturut-turut (2005-2010, 2011-2015). Hal ini yang kemudian menjadi kendaraan terbuka yang melaju kencang bagi keluarga Mus. Hal ini dibuktikan juga bahwa Golkar mampu mengantarkan para adik-adik AHM (Zainal Mus, Aliong Mus dan Alien Mus) untuk menduduki posisi yang sama di DPRD.

Untuk menembus perpolitikan lokal di Kepulauan Sula, keluarga Mus menggunakan dua jalur efektif, yaitu jalur partai politik, dan birokrasi. Dua jalur yang efektif ini mengingatkan kita akan konsep elit yang didefinisikan oleh Gaetano Mosca, dimana terbagi dua kelas dalam memahami elit. Kelas yang pertama, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh yang pertama, dalam masalah yang saat ini kurang lebih legal, terwakili, serta mensuplai kebutuhan kelas yang pertama, paling tidak saat kemunculannya, dengan instrumen-instrumen yang penting bagi

vitalitas organisme politik (Varma, 2003). Partai politik dan birokrasi merupakan dua instrumen utama yang jika dikendalikan oleh kelas pertama maka mereka dapat memegang semua fungsi politik dan memonopoli kekuasaan seperti tutur Mosca.

Baringtone Moore dalam Ladiqi dan Wekke (2018) menjelaskan bahwa sebuah kelas penduduk kota yang besar dan independen telah menjadi elemen penting yang sangat diperlukan dalam pengembangan demokrasi. “*No bourgeoisie, no democracy*” adalah semboyan yang cukup terkenal dari Moore yang berarti bahwa demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi. Kaum borjuis inilah yang tergambar dalam bentuk profil para pengusaha sukses yang tidak sedikit mengucurkan dana untuk partai politik. Hal ini pula terjadi pada hubungan keluarga Mus yang berlatar pengusaha kemudian menjadi aktor penting bahkan utama dalam sebuah partai besar di Indonesia pada level daerah. Mus sebagai profil borjuis di Kepulauan Sula saat itu dianggap mapan untuk menjadi salah satu elit politik lokal di Sula. Inilah perahu awal bagi keluarga Mus yang akan mengembangkan karir politik mereka.



## Jalur Partai Politik

Keluarga Mus mengawali karir politik mereka melalui pintu partai politik, Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini telah menjadi wadah dari sekurangnya lima anggota keluarga Mus dalam rangkaian pemilu di Kabupaten Kepulauan Sula dan Provinsi Maluku Utara sejak 2004, sebut saja Ahmad Hidayat Mus, Aliong Mus, Zainal Mus, Alien Mus, Nurrohmah Mus adalah anggota keluarga yang menjadi kader loyal dari partai ini, walaupun kemudian Zainal Mus berpindah haluan ke PDIP pada tahun 2014. Saat pertama menjadi bagian dari partai, AHM yang dengan modal finansial yang amat besar waktu itu langsung memberi pengaruh bagi keadaan partai Golkar. Namun, ada yang menarik terkait proses bergabungnya AHM di partai Golkar. Saat itu diketahui, AHM mendatangi beberapa sesepuh Sula yang juga sebagai pengurus Golkar seperti Yamin Waisale, yang kemudian mempertemukannya dengan orang-orang berpengaruh di Golkar seperti Syamsir Andili (Walikota Ternate saat itu), hingga ke Akbar Tandjung.

*“... termasuk Yamin Waisale, orang ini yang membesarkan dia lewat memanipulasi jalur HMI. Dia ini yang mempertemukan AHM dengan Syamsir Andili, nanti Syamsir Andili mempertemukan AHM dengan Akbar Tandjung, mereka ini yg mengajari AHM menghafal*

*tujuan HMI, semangat HMI, ketemu dengan Akbar Tandjung agar diyakinkan bahwa itu kader. Ini proses manipulasi kader saja...”* (Wawancara dengan Advokat & Aktivistis LSM Anti Korupsi Maluku Utara, tanggal 9 Mei 2018)

Proses manipulasi pengkaderan ini dilakukan karena Golkar adalah partai jenjang kader. Artinya proses pengkaderan partai ini menggunakan jenjang yang harus sudah selesai diikuti semua orang, termasuk salah satunya masuk sebagai basis kader HMI. AHM yang diketahui tidak pernah ikut HMI sebelumnya diminta menghafal tujuan dan asas organisasi HMI sehingga layak “dijual” untuk dipertemukan dengan Akbar Tandjung. Dari sinilah awal mula AHM masuk dan dibentuk oleh Golkar sehingga menjadi “produk politik” siap dipasarkan menuju Pilkada pertama di Sula.

Sebagai pembuka pintu bagi adik-adiknya, AHM dikatakan mampu memberi jalan yang mulus. Ketika para adik mulai menjadi kader dengan partai yang dipimpinya di daerah, mereka mulai bermanuver dan mampu meniti karir politik lebih tinggi tanpa menunggu waktu yang lama. Pasca terpilihnya dia sebagai bupati Kepulauan Sula periode pertamanya 2005-2010, AHM sudah menjabat sebagai ketua DPD II Partai Golkar Provinsi Maluku Utara. AHM kembali terpilih sebagai bupati Kepulauan Sula di periode keduanya yaitu 2010-2015, pasca terpilih jadi bupati

di periode keduanya, AHM dilantik menjadi ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

Keberhasilan AHM dalam menguasai posisi sentral di partai Golkar adalah awal dari dominasi keluarga Mus pada tubuh partai Golkar, yang kemudian memunculkan stigma baru masyarakat terhadap keluarga Mus yang dikatakan membangun “kerajaan kecil” di partainya sendiri, sebelum membangun “kerajaannya” di Kepulauan Sula.

*“... di partai juga dia membangun itu. Yang pastinya diproteksilah seluruh kekuasaannya itu, untuk kepentingan dia dan keluarga. Karena struktur dia kuasai, partai politik dia kuasai, pemerintahan dia kuasai dan juga dia tidak memberikan peluang bagi orang lain untuk masuk dan berkompetisi lebih jauh disitu, bisa dikatakan cara memimpinnya agak otoriter gitu...”* (Wawancara Advokat Maluku Utara dan Kepsul, tanggal 15 April 2018).

Berkembangnya dinasti politik di daerah tidak terlepas dari peran partai politik yang memberikan ruang bagi lahirnya oligarki, dimana menyebabkan mekanisme pencalonan kandidat tidak berjalan sebagaimana mestinya (Mukti dan Rodiyah, 2020). Fenomena memanfaatkan kepopuleran nama keluarga dalam ranah politik bukanlah hal yang tabu atau dilarang dalam pelaksanaannya. Memang diakui, memanfaatkan kepopuleran nama keluarga

merupakan peran paling signifikan dalam melanggengkan politik keluarga. Hal ini seperti dijelaskan oleh Dal Bo (2009), bahwa keberlangsungan dinasti politik (dalam hal ini adalah politik keluarga) disebabkan adanya kekuasaan dan pengaruh politik yang dapat diakumulasikan dan diwariskan kepada anggota keluarga. Sehingga dengan keberhasilan Mus membangun citra keluarganya, masyarakat akan percaya bahwa jika seluruh anggota keluarga akan membawa dan melakukan hal yang sama dalam politik lokal Sula sebagai seorang dari generasi keluarga Mus.

### **Jalur Birokrasi**

Melihat dari perspektif historis, sangat sulit untuk membuat birokrasi bisa terbebas dari politisasi, karena bisa dilihat kecenderungan adanya kooptasi penguasa negara terhadap institusi birokrasi. Konsep *bureaucratic polity* yang pertama kali dikemukakan oleh Riggs dalam melihat kehidupan birokrasi di Thailand, kemudian digunakan oleh Harold Crouch untuk melihat kasus di Indonesia membuktikan kenyataan tersebut. Menurut Crouch, kepentingan penguasa negara yang diwakilkan lewat institusi birokrasi mengalami penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam

mengontrol birokrasi, tetapi juga karena ketidakmampuan birokrasi untuk melepaskan diri dari cengkeraman penguasa negara. Dengan kata lain, meskipun politisasi birokrasi bukan semata-mata identik dengan upaya mempolitiskan birokrasi, ia juga sarat dengan usaha menciptakan masyarakat yang buta akan politik birokrasi (Tjokrowinoto, 2001)

Jalur birokrasi yang digunakan keluarga Mus diketahui merupakan salah satu jalur pertahanan pasca memenangkan pilkada tahun 2004 di Kepulauan Sula. Hingga saat ini, terdapat dua alasan kuat mengapa para birokrat di Kepulauan Sula dengan mudah dijadikan alat politik untuk konflik kepentingan dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dua hal tersebut adalah; (i) ketakutan akan tidak mendapatkan jabatan struktural di instansi (biasanya untuk golongan IV/pimpinan); (ii) adanya ancaman mutasi yang tidak mengikuti arahan pimpinan (biasanya untuk golongan III kebawah).

*“... karena orang yang melawan kebijakan dia, sudah pasti akan dipecat secara tidak terhormat, banyak sudah kepala dinas itu. Sehingga ada ketakutan-ketakutan itu secara tidak langsung terhadap proses itu. Bahkan kadis-kadis itu dipakai untuk memproteksi kepentingan dia, misalnya bawahan-bawahan yang melawan di pindahkan, dimutasi, di nonjob,*

*iya.. ditaruh di daerah terpencil. Jadi orang takut...”* (Wawancara Advokat Maluku Utara & Kepsul, tanggal 15 April 2018)

Permasalahan profesionalisme birokrasi pada ajang pemilihan kepala daerah selalu menjadi persoalan di berbagai daerah (Firman, 2017). Pengendalian birokrasi dinilai sangat ampuh untuk menutup akses dan mendulang suara pada pemilihan-pemilihan berikutnya baik untuk AHM sendiri maupun pertarungan adiknya. Mengingat profesi PNS ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling diminati dan banyak orang Sula dan keluarganya bergantung pada profesi ini. Hal ini karena rantai ekonomi di Kepulauan Sula tidak cukup baik.

Alur yang terbaca dalam proses kendali kekuasaan politik keluarga Mus di Kepulauan Sula adalah rangkaian hubungan antara birokrat-politisi-masyarakat. Birokrat dan politisi mempunyai akses kekuasaan (*power*) untuk memberikan izin, memberikan proteksi, membuat dan mengesahkan peraturan, tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kehidupan dan kepentingan ideologinya. Pebisnis (dalam kasus IUP di Taliabu) tidak memiliki akses tersebut, akan tetapi mempunyai modal atau uang untuk memperoleh akses tersebut. Masyarakat yang memiliki tujuan tertentu hadir di antara ketiganya dan

memperoleh akses dan objek dari kepentingan birokrat, politisi, dan pebisnis (Nordholt dan Klinken, 2014).

### **Lahan Baru Kekuasaan (Pemekaran)**

Indonesia memilih istilah ‘pemekaran’ untuk menyebut subdivisi distrik-distrik dan provinsi yang ada dalam rangka menciptakan unit-unit administratif baru. Pemekaran juga terjadi pada negara-negara lain seperti di Amerika Serikat yang disebut dengan *redistricting*, yaitu pembentukan kembali distrik-distrik dan menyangkut politik pemilihan (Nordholt dan Klinken, 2014). Pemekaran yang merupakan buah dari desentralisasi ini, seharusnya bisa dilakukan sesuai dengan prinsip otonomi yang digagas dari awal dan memberi hasil yang bisa dinikmati pasca pemekaran. Namun, Jeddawi (2009) menemukan pemekaran dilakukan atas dasar keinginan segelintir orang yang disebut elit lokal. Secara spesifik, Ramdhani (2019) menyatakan bahwasanya hasil pemekaran di beberapa daerah tidak serta merta menghasilkan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya, bahkan cenderung menghasilkan dinasti politik kekeluargaan.

Pemekaran Taliabu sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan

dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012. Penulis melihat pemekaran ini sebagai salah satu sumber daya untuk konsolidasi kekuatan politik baru dari politik keluarga Mus. Tergambar jelas motif politik yang melatarbelakangi pemekaran pulau Taliabu yang terbilang cukup tergesa-gesa. AHM menjadi Bupati pada tahun 2005, setahun berselang isu pemekaran Taliabu sudah santer terdengar hingga pada terealisasikan pada tahun 2012. Uniknya, pertarungan politik memperebutkan kekuasaan di Taliabu sendiri hanya diikuti oleh dua pasangan calon yakni Zainal Mus dan Aliong Mus yang mana keduanya adalah kakak beradik keluarga Mus. Hal ini jelas menguatkan asumsi masyarakat bahwa Kabupaten Taliabu memang merupakan lahan yang disiapkan untuk keluarga Mus sendiri.

*“...kompetisi pertama di pulau Taliabu ini pertarungan keluarga. Karena yang bertarung cuma dua kakak beradik. Berarti ini fenomena dalam kajian perebutan kekuasaan baru di lahan baru. Arena ini disiapkan oleh AHM. Karena agak unik memang kok cepat dimekarkan. Padahal daerah induknya saja masih masuk daerah tertinggal. Fasilitas di Sula masih termasuk daerah tertinggal. Sudah ada pemekaran baru...”* (Wawancara Advokat Maluku Utara dan Kepsul, tanggal 15 April 2018)

Salah satu kendala Taliabu untuk dimekarkan adalah masalah jumlah

penduduk yang belum cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai daerah pemekaran baru. Untuk masalah jumlah penduduk, hal ini penulis bertanya langsung pada ketua tim pemekaran Taliabu saat itu yang juga menjabat sebagai Asisten 3 di Kepulauan Sula, Bapak Salim Bahnan. Menurut beliau, salah satu kendala pemekaran memang benar tentang jumlah penduduk. Hal ini juga bahkan sempat ditanyakan langsung oleh Kemendagri dan DPR RI ketika dilakukan uji kelayakan. Jawaban normatif yang disampaikan tim pemekaran melalui Bupati AHM saat itu adalah dengan mendatangkan dan membuka peluang bagi imigran-imigran lokal dari daerah terdekat untuk berdomisili di Taliabu sehingga diharapkan mampu mencukupi jumlah penduduk tersebut. Uniknyanya ketika penulis mengkonfirmasi ini pada salah satu LSM Anti Korupsi di Maluku Utara, ditemukan bahwa imigran-imigran lokal yang dikatakan akan didatangkan hanyalah berupa nama diatas kertas dan nama-nama tersebut diambil dari data penduduk kota Sanana (ibukota kecamatan Kepulauan Sula), yang artinya nama-namanya ada, tetapi wujud orangnya tidak pernah ada. Inilah salah satu keganjilan yang ditemukan dalam proses pemekaran pulau Taliabu.

## **KESIMPULAN**

Kemampuan dan dominasi seseorang/kelompok dalam bentuk politik keluarga untuk memperoleh kekuatan dan mengendalikan kekuasaan secara maksimal adalah suatu prestasi yang luar biasa dalam iklim perpolitikan lokal di level daerah. Hal demikian tentu saja menyangkut kemampuan keluarga tersebut untuk mengkooptasi sumber-sumber kekuasaan dan mengendalikannya. Relasi dan konsolidasi yang tercipta kuat antar keluarga sendiri menjadi penentu sehingga politik keluarga sebagai transportasi yang menjanjikan untuk menuju karir politik yang mapan.

Sebagai elit atau aktor yang sentral, Ahmad Hidayat Mus memiliki apa yang disebut skill atau keahlian dalam melakukan lobi politik. Selain modalitas ekonomi sebagai modal awal masuk ke kancah politik, keahlian dalam melakukan lobi politik seperti pola komunikasi yang efektif dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Indikasi yang terlihat ialah dengan disetujuinya Ahmad Hidayat Mus untuk masuk dan menjadi kader partai Golkar tanpa melalui proses berjenjang kaderisasi yang sesuai dengan aturan partai politik itu sendiri.

Pola karir politik keluarga yang dijalankan oleh anggota keluarga, terkesan

memiliki kurikulum basic yang mana kurikulum ini dibuat oleh *central actor* itu sendiri, sehingga untuk mencapai tujuan menguasai *resources* lebih cepat dan terarah. Indikasinya ialah, dengan melihat tabel pola karir politik masing-masing anggota keluarga dapat terlihat setiap jenjang karir politik yang dilalui adalah sama persis dengan yang sebelumnya. Dan perjalanan pola karir ini dikatakan *resource driven* karena terlihat dari rentang waktu yang sangat singkat dalam menjadikan politik keluarga sebagai elit yang mendominasi.

Menggunakan konsep C.Wright Mills tentang keterkaitan antar institusi adalah hal yang dilakukan elit untuk menciptakan dan mempertahankan dominasi kuasanya, maka dalam tesis ini ditemukan konsolidasi tiga institusi besar; politik, birokrasi, dan ekonomi dalam menjalankan kuasa atas politik keluarga. Konsolidasi tiga institusi ini tergambar pada bagaimana tiga strategi ini dimanfaatkan oleh elit keluarga untuk digunakan. Singkatnya, tiga institusi ini bukan hanya digunakan sebagai strategi, tapi cara pemanfaatannya pun berupa konsolidasi yang kuat.

Bila dilihat tahapan prosesnya, penguasaan partai politik adalah jalan pertama yang dilakukan untuk menuju kursi

sebagai elit lokal Kepulauan Sula. Penguasaan partai politik sendiri dinilai cukup berhasil karena internal partai pun dalam beberapa periode jabatan-jabatan penting dikuasai oleh keluarga Mus sendiri, sehingga proses elektoralpun bisa menjadi fokus partai untuk pemenangan. Hingga pada tahap selanjutnya yaitu penguasaan birokrasi (dengan catatan sudah berhasil pada tahapan pertama), dimana keluarga Mus dikatakan memanfaatkan sumber kekuasaan kedua ini melalui penyerapanpenyerapan sumber daya baik materi maupun dukungan masyarakat secara penuh melalui kendali-kendali kebijakan ekonomi serta jabatan. Selain itu, indikasi yang lain dapat terlacak melalui salah satu hidden agenda penyebab pemekaran Taliabu yang terkesan diburu-buru.

## REFERENSI

- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 16(1), 5-32.
- Bakar, A. (2016). Politi Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(1), 105-119.
- Bakti, Andi Faisal. (2014). Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan, dalam *Politik Lokal di Indonesia*. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van

- Klinklen (Eds.) Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political Dynasties. *The Review of Economic Studies*, 76(1), 115-142
- Djati, W. R. (2014). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 203-231.
- Firman, F. (2017). Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 88-105.
- Harahap, U. H. (2016) *Politik Keluarga di Sumatera Utara (Pola Transformasi Aktor Lokal Di Sumatera Utara Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi)*. Tesis, Program Pascasarjana Fisipol, Universitas Gadjah Mada.
- Haryanto. (2014). *Klanisasi Demokrasi: Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Penerbit Polgov UGM.
- Jeddawi, M. (2009). *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Penerbit Total Media.
- Ladiqi, S., & Wekke, I. S. (2018). *Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
- Mukti, H. H., & Rodiyah, R. (2020). Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy?. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 531-538.
- Nawawi, H. (2007). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nordholt, H. S. (2005). Desentralisasi di Indonesia: Peran Negara Kurang Lebih Demokratis? dalam J. Harris, K. Stokke & O. Tornquist (eds) *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
- Nordholt, H. S., & Klinken, G. V. (2014). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Pasan, E. (2013). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001–2011. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(3), 222-235.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 97-124.
- Querubin, P. (2012). Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines. In *APSA 2012 Annual Meeting Paper*.
- Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 219-226.
- Rossi, M. (2009). *The Causes of Political Dynasties in Democratic Countries*. Unpublished manuscript. [http://economia.uniandes.edu.co/content/.../29957/.../Political\\_Dynasties\\_Rossi.pdf](http://economia.uniandes.edu.co/content/.../29957/.../Political_Dynasties_Rossi.pdf) (accessed on August 11, 2018).
- Sidel, J. T. (2005). Bossism and democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: towards an alternative framework for the study of 'local strongmen'. In *Politicising democracy* (pp. 51-74). Palgrave Macmillan, London.
- Smith, D. M. (2012). *Succeeding in politics: dynasties in democracies* (Doctoral dissertation, UC San Diego).
- Suaib, E. (2016). Fenomena 'Bosisme Lokal' di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 51-69.
- Sujarwoto, S. (2016). Desentralisasi, dinasti politik dan kemiskinan di

Indonesia. *Jurnal Ilmiah  
Administrasi Publik*, 1(2), 1-6.

Tjokrowinoto, M, dkk. (2001) *Birokrasi  
Dalam Polemik*. Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar.

Wardhani, M. A. (2015). *Dinasti Politik di  
Amerika: Studi Kasus Dinasti Politik  
Klan Kennedy*. Tesis, Program S2  
Pengkajian Amerika, Universitas  
Gadjah Mada.

Varma, S. P. (2003). *Teori Politik Modern*.  
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.